

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Implementation of the Family Hope Program in Sebuntal Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency

Maharani Putri¹, Muhammad Noor², Melati Dama³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 01

Page : 1-8

Published : 2021

KEYWORDS

Implementation, Family Hope Program

CORRESPONDENCE

E-mail:

maharaniputri220598@gmail.com

A B S T R A C T

This research is intended to find out the implementation of the Family Hope Program in Sebuntal Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency, whether PKH has so far been in accordance with implementation indicators in achieving goals, integrity, and adaptation and also to find out the factors that influence the Family Hope Program (PKH) in Sebuntal Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency. This study used descriptive qualitative method. The location is in Sebuntal Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency. Data collection was carried out by library research, observation, in-depth interviews, and documentation techniques. Data analysis was carried out by collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. The results of this study indicate that the success of the implementation of the Family Hope Program in Sebuntal Village, Marangkayu District, in general, can be said to be running smoothly even though there are some beneficiaries who have not been on target.

INTRODUCTION

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan ini banyak terjadi negara-negara yang berkembang termasuk negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana tujuan negara yang tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat seperti halnya kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makna kemiskinan menurut Suparlan (2004:315) adalah sebagai suatu

standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya nsuatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Oleh karena itu untuk mengurangi masyarakat miskin yang semakin meningkat dan mensejahterakan masyarakat yaitu dengan upaya pengentasan kemiskinan harus adanya program pemerintah yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan yang semakin tinggi setiap tahunnya yang mana program ini mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dan juga perlu adanya upaya proses penyelesaian masalah kemiskinan melalui berbagai bentuk program khusus yang dibuat oleh pemerintah

pada saat ini, harus memiliki tujuan utama dalam mengurangi risiko sosial, meningkatkan kesetaraan sosial, dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan, sehingga pada nantinya masyarakat miskin dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana bertahap per tahun pada masyarakat miskin yang tercatat sebagai penerima bantuan melalui tahap-tahap yang telah di seleksi dan di validasi oleh Pengurus PKH. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan. Wilayah Kecamatan Marangkayu terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Perangat Baru, Desa

Bunga Putih, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sebuntal, Desa Kersik, Desa Santan Ilir, Desa Santan Tengah, Desa Santan Ulu, Desa Sambera Baru, dan Desa Semangkok. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu mulai pada tahun 2013 dan pada tahun itu tercatat sekitar 718 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian mengalami penambahan atau perluasan penerima bantuan seperti ditahun 2018 sebanyak 519 keluarga, total secara keseluruhan penerima bantuan di kecamatan marangkayu sebanyak 1.237 KPM. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Lebih lanjut, Menurut (Thoha, 2012) kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan harmoni dari para pihak yang

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Implementasi Kebijakan

Dalam buku (Dr. Solichin, 2003) bahwa "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau terencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip". Karena itu, setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu diimplementasikan sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia.

Terdapat empat model implementasi kebijakan George C. Edward III yang berpengaruh dalam terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain :

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
2. Sumberdaya faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ada beberapa sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu: Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya informasi dan kewenangan, dan Sumber daya peralatan.
3. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor akan kebijakan

tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri.

4. Struktur Birokrasi Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2016: 141), kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber sumber daya tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Konsep Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. (sumber: Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan 2019). Berdasarkan Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2019, tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

1. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat, melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

3. Mengurangi kemiskinan dan mengenalkan manfaat produk kesenjangan, dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target yang ingin dicapai oleh Program Keluarga Harapan.

Kemiskinan

Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya. (Suryawati, (2004).

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini adalah peneliian kualitatif deskriptif. Menurut (Kriyantono,2010:69). mengatakan bahwa jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu. Metode kualitatif deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode wawancara,

pengamatan langsung, dokumentasi dan lain sebagainya.

RESULT AND DISCUSSION

Komunikasi

Tujuan Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan komunikasi dalam pelaksanaan PKH dapat dikatakan berjalan dengan efektif hal ini ditandai dengan pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam rogram Keluarga Harapan

(PKH) rutin melakukan sosialisasi program menyampaikan informasi kepada peserta, mengadakan pertemuan untuk membahas apa saja yang perlu diperbaiki dalam menjalankan program ini adalah bentuk komunikasi yang berjalan dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang paling penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya serta ibu hamil dan balita dapat memeriksakan kesehatannya sebagaimana tujuan dari program ini.

Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Marangkayu. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

A. Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Menurut Mulyadi (2015:28) Sumberdaya Manusia adalah merupakan kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

B. Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, bahkan terkadang program memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program keluarga harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Sumberdaya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial. Sumberdaya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Terkait dengan dana dan peralatan tersebut berdasarkan temuan penulis dilapangan, insentif dan sarana prasarana bagi pendamping PKH sudah dirasa cukup dengan apa yang pendamping kerjakan untuk mendampingi peserta-peserta PKH.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan "kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif". Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salahsatu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Maka, biasanya ditempuh penyelesaian ataupun antisipasi dengan upaya penempatan pegawai

sesuai dengan dedikasi dan bidangnya, serta pemberian insentif.

Hasil dari wawancara dapat diidentifikasi Disposisi yang telah dijelaskan diatas, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa benar untuk pengangkatan pelaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena proses rekrutmen pegawainya melalui seleksi dari Kementerian Sosial.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.

a. SOP (Standar Operating Procedure)

Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Harapan dengan

adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

a. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, terkadang terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi dapat mengakibatkan macam pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Marangkayu telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standart operating procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sebuntal telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara pelaksana dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dari program keluarga harapan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara berdasarkan fokus dan isi pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu yang dinilai dari beberapa aspek yaitu :

a) Komunikasi

Setelah melakukan penelitian, komunikasi antar pihak terkait, pendamping dan peserta dapat dikatakan efektif. Hal ini ditandai dengan rutin melakukan sosialisasi kepada peserta dan rutin melakukan pertemuan antar pihak pelaksana setiap bulan guna membahas apa saja yang perlu diperbaiki dalam berjalannya PKH di Desa Sebuntal.

b) Sumber Daya

Hasil wawancara dengan pihak terkait, sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PKH dinilai baik karena semua pendamping sosial ialah orang-orang yang telah melalui tahap seleksi oleh Kementerian Sosial. Begitupun dengan sumber daya finansial insentif dan sarana prasarana dapat dikatakan cukup.

c) Disposisi

Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana semua melalui seleksi kemudian para calon pendamping sosial mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan menurut hasil penelitian, SOP yang digunakan dalam pelaksanaan PKH prosedur dan aturan yang harus diikuti sudah termuat dalam buku pedoman PKH. Sedangkan dalam pelaksanaan suatu program, terkadang terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa

unit kerja maupun instansi sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Adapun dalam program PKH di Desa Sebuntal ini melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya dari pihak kecamatan, Korkab PKH, Pendamping PKH, Kades dan masyarakat sebagai sasaran dari program ini.

Keberhasilan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu secara umum dapat dikatakan berjalan lancar meski ada beberapa penerima yang belum tepat sasaran namun demikian PKH dinilai dapat membantu dalam mengatasi persoalan-persoalan biaya kesehatan dan pendidikan keluarga penerima bantuan.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2013 hingga sekarang. Jumlah penerima PKH di Kecamatan Marangkayu masyarakat mengalami naik dan turun, seperti ditahun awal penerima bantuan berjumlah 655 kemudian pada tahun 2018 jumlah penerima terbanyak yaitu 1341 kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan penerima bantuan menjadi 886, setelah itu pada 2020 mengalami pelonjakan kenaikan penerima bantuan menjadi berjumlah 1271. Terjadi pelonjakan kenaikan jumlah peserta PKH sebesar 385 KPM. Meski demikian, menurut penuturan dan hasil observasi masih terdapat penerima yang belum tepat sasaran hal ini dikarenakan proses pendataan yang belum maksimal.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Askara, 2008)

- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung Refika Aditama, 2005).
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003).
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kriyantono. Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002).
- Riant Nugroho Dwijiwiyoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003)
- Ritonga, Hamonangan. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Suparlan, Parsudi 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Dokumen-dokumen:**
- Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial No. 03/LJS/01/2019, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang No. 10 Tahun 2014, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan